

**PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA MALEO KECAMATAN PAGUAT
KABUPATENPOHUWATO**

Oleh :

DANDRIYANTO AHMAD

NIM : S2117162

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MALEO KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO

Oleh

DANDRIYANTO AHMAD

S2117162

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
una memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2021

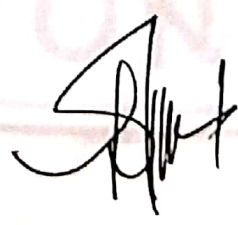
PEMBIMBING I


Hasman Umuri, S.IP., M.Si
NIDN : 0923038901

PEMBIMBING II


Drs. Noor Asief, M.Si

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**PERENCANAAN PARSITIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA MALEO KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN
POHUWATO****OLEH****DANDRIYANTO AHMAD****NIM : S.2117162**

Telah memenuhi syarat dan Dipertahan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Tanggal Mei 2021

KOMISI PENGUJI

1. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
2. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
3. Apriliani Parengring, S.IP.,M.AP
4. Hasman Umuri, S.IP, M.Si
5. Drs. Noor Asief, M.Si

**MENGETAHUI,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa, 2021

Yang membuat Pernyataan



DANDRIYANTO AHMAD

S2117162

ABSTRACT

DANDRIYANTO AHMAD. S21117162. PARTICIPATORY PLANNING IN DEVELOPMENT IN MALEO VILLAGE, PAGUAT SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

This study aims to find out the participatory planning process and its implementation in the development in Maleo Village, Paguat Subdistrict, Pohuwato District. This study applies the qualitative approach. The informants in this study are the Subdistrict Head, Maleo Village Government, Local Consultative Agency, and a number of community leaders. The results of the study indicate that the implementation of participatory planning in Maleo Village is considered quite good. This is evidenced by the existence of guidelines in the village as a reference for the implementation of participatory planning. With the socialization carried out by the village government, the community is able to understand the importance of participatory planning and implementation of development plans through the village's community discussion on development planning. The village's community discussion of development planning has become a forum for the community to contribute to solving problems in Maleo village. Although it is acknowledged that there is still a lack of equity in development, it has been going well on the side and not in the other side. Once their enthusiasm for sharing their aspirations fades, they attend village meetings even though the program proposed is often not the goal. The community involvement in the development planning is still lacking because they only actively provide advice, while other involvements such as promoting and maintaining development outcomes are still lacking. This can be seen from the lack of activities in the village such as mutual cooperation and other activities to strengthen village communities. Maleo villagers are very patient. If their proposed development program is not implemented by the government, they will wait and propose it again next year. It happens because of the influence of the majority of people who are not serious about expressing their aspirations tend to be indifferent and only focus on daily activities.

Keywords: *participatory planning, village development*



ABSTRAK

DANDRIYANTO AHMAD. S2117162. PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MALEO KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa proses perencanaan partisipatif dan implementasinya dalam pembangunan di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Informan dalam penelitian ini adalah Camat, Pemerintah Desa Maleo, BPD, dan sejumlah tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan partisipatif di Desa Maleo dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pedoman di desa sebagai acuan pelaksanaan perencanaan partisipatif. Berkat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dapat memahami pentingnya perencanaan partisipatif, serta pelaksanaan rencana pembangunan melalui musrenbang-des. Musrenbang-des telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah di desa Maleo. Meskipun diakui masih kurangnya pemerataan dalam pembangunan, namun pembangunan berjalan baik di satu sisi dan tidak di sisi lain, namun begitu semangat berbagi aspirasi mereka memudar mereka menghadiri rapat desa meskipun program yang Anda usulkan adalah seringkali bukan tujuannya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih kurang karena hanya aktif memberikan nasehat, sedangkan pelibatan lain seperti pemajuan dan pemeliharaan hasil pembangunan masih kurang. Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan dalam kegiatan desa seperti gotong royong dan kegiatan lain untuk memperkuat masyarakat desa. Penduduk desa Maleo sangat sabar. Jika program pembangunan yang mereka usulkan tidak dilaksanakan oleh pemerintah, mereka akan menunggu dan mengusulkannya lagi tahun depan. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh mayoritas masyarakat yang tidak serius mengutarakan aspirasinya, cenderung cuek dan hanya fokus pada aktivitas sehari-hari

Kata kunci: perencanaan partisipatif, pembangunan desa



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Untuk mencapai keberhasilan maka bekerja keraslah dalam
hidupmu karena waktu adalah uang maka jangan sia-siakan
waktumu

(Dandriyanto Ahmad)



PERSEMBAHAN

Assallammualaikum Wr.wb

Kupersembahkan kepada kedua orang tua (Udin Ahmad & Rabiyanti Bagoë) yang selalu mendoakan dan mengingatkan. Kakakku (Dedi ahmad) yang selalu memberikan semangat. calon pendamping yang selalu menemani baik suka maupun duka, serta teman-teman sopol yang tidak dapat di sebut satu persatu selalu memberikan dorongan yang baik dan memotivasi.

ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“PerencanaanPartisipatifdalam Pembangunan Di Desa Maleo Kecamatan Paguat KabupatenPohuwato”**.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori mengenai Perencanaan Partisipatif dan Pembangunan desa, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Muhammad ichsan Gaffar, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Arman S.Sos.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
4. Ibu Darmawaty Abdul Razak S.IP.,M.AP Selaku ketua program studi ilmu pemerintahan

5. Bapak Hasman Umuri S.IP., M.Si Selaku Pembimbing I dan Drs. Noor Asief M.Si Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan arahan.
6. **Seluruh Staf dosen di Universitas Ichsan Gorontalo khususnya dosen pengajar pada Fakultas Sospol yang tidak sempat penulis tulis namanya satu persatu.**
7. **Rekan-rekan mahasiswa Jurusan / Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.**
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, serta Saudara-saudaraku yang telah membantu mendoakan saya selama dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga amal ibadah semua pihak yang telah membantu penulis mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin

Marisa,.....2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTCRAK	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Perencanaan Pembangunan.....	11
2.2.Proses Perencanaan Pembangunan.....	19
2.3.Partisipasi Masyarakat	25
2.3.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	25
2.3.2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat	30
2.4.Perencanaan Pembangunan Partisipatif	35
2.5.Teori Implementasi.....	39
2.6.Pembangunan Desa	42
2.6.1. Pengertian Pembangunan Desa	42
2.6.2. Perencanaan Pembangunan Desa	45
2.7.Kerangka Pemikiran	47

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.Objek dan Lokasi Penelitian	49
3.2.Desain Penelitian	49
3.3.Definisi Operasional	49
3.4.Populasi dan Sampel	51
3.5.Jenis dan Sumber Data.....	51
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.7.Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.1.1. Profil Desa Maleo Kecamatan Paguat	54
4.1.2.Struktur Organisasi Pemerintah Desa Maleo	59
4.1.3. aspek geografis dan demografi.....	62
4.2.PerencanaanPartisipatif Dalam Pembangunan	73
4.2.1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perencanaan Partisipatif	73
4.2.2. Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif.....	75
4.2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	77
4.2.4. Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan Desa	83
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	83

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah Pemerintah Desa	55
Tabel 2. Sejarah Pembangunan Desa	56
Tabel 4.1.2 Struktur Pemerintah Desa	59
Tabel 4.1.3 Aspek Geografi dan Demografi	62
Tabel 4.1.6 Potensi Desa Tahun 2019	66
Tabel 4.1.7 Bencana Alam Desa Maleo 2019	67
Tabel 4.1.8 Evaluasi RKPDDes dan RPJMDes.....	67
Tabel 4.1.8.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	67
Tabel 4.1.8.2 Aspek Kesejahteraan Sosial	68
Tabel 4.1.8.3 Aspek Pelayanan Umum.....	69
Tabel 4.1.8.4 Aspek Daya Saing	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Maleo	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPD Maleo	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Lokasi.....
Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
Lampiran 6. Hasil Turnitin.....
Lampiran 7. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih terbuka akan adanya perubahan-perubahan, khususnya dalam hal pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pada masa orde baru serba sentralistik kemudian perlahan mulai berubah menjadi lebih dekat dengan rakyat. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 1998 otonomi daerah mulai digalakkan dengan keluarnya Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Daerah diberi otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kemampuan dan kreativitas daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi, daerah dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah sehingga hasil pembangunan dapat lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu, daerah dengan sendirinya akan mengalami proses pemberdayaan serta kemandirian daerah akan terbangun secara signifikan.

Dengan adanya Undang-Undang dan peraturan-peraturan tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan itu adalah pelaksanaan pembangunan. Tahapan yang paling awal dan paling vital dalam

pembangunan adalah tahap perencanaan. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam suatu negara. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional. Hal ini juga terdapat pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 33, yaitu:

1. Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan, Kepala Daerah dibantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
3. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan antar Kabupaten/Kota.

Perencanaan adalah awal dari seluruh rangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan tertentu. Dalam arti luas, perencanaan tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Waterson dalam Bintoro Tjokroamidjojo (1985:12) mengatakan bahwa perencanaan adalah “melihat ke depan dengan mengambil alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan dengan terus mengikuti pelaksanaannya agar tidak menyimpang dari tujuannya.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan adalah agar kesejahteraan dapat terpenuhi, karena kesejahteraan merupakan harapan dari

semua masyarakat. Kesejahteraan ditentukan oleh seberapa jauh seseorang dapat memperoleh barang/jasa dan fasilitas publik yang dibutuhkan. Penyediaan barang dan jasa tersebut sebagian besar disediakan oleh negara. Peran negara dalam hal ini kemudian diselenggarakan pemerintah dalam bentuk pembangunan.

Selain perencanaan yang matang, keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat (*Community development*) juga sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segala hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun dan menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan yaitu

mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melaksanakan pembangunan.

Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan pemerintahan, *Pertama*: perlu *aspiratif* terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu *sensitive*. *Kedua*: Pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuanyang dimiliki oleh masyarakat daam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai *provider* dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga

pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Sebagaimana dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul Desa, kewenangan yang diserahkan kabupaten dan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat serta urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, yakni usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pedesaan dan

masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi identifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, penyusunan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, implementasi program dan pengawasannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diarahkan dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat pedesaan setempat berarti orientasi pembangunan adalah ke dalam karena anggota masyarakat dianggap pihak yang paling mengetahui potensi dan kondisi masyarakatnya.

Dalam masyarakat desa, perencanaan partisipatif merupakan sebuah instrument yang sangat penting, sebab merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan desa. Desa sebenarnya memiliki posisi yang strategis dalam gemuruh pembangunan dan politik pemerintahan di seluruh tanah air. Dari sisi penduduk, desa merupakan basis mayoritas penduduk, atau dengan kata lain sebagian besar penduduk di negeri ini menetap di desa. Hal ini memungkinkan desa menjadi penyedia tenaga kerja terbesar dan di sisi lain desa menjadi basis massa yang kerap di mobilisasi demi kepentingan politik. Dari sumber daya alam, desa merupakan pensuplai utama sumber bahan makanan penduduk ke kota-kota besar. Oleh karena itu, pada fase ini sudah selayaknya perencanaan pembangunan

di desa merupakan sebuah hasil proses musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh sehingga pelaksanaan pembangunan di desa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien.

Namun demikian, terkait dengan proses pembangunan desa, belum terlihat secara utuh implementasi perencanaan partisipatif yang menjadi amanat baik yuridis maupun sosiologis dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum dapat ditemukan bahwa selama ini partisipasi masyarakat desa relative lemah, baik dalam proses pembuatan kebijakan lokal desa maupun untuk mengatur aktivitasnya sendiri. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga terletak pada tertutupnya mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan.

Jika dilihat kebelakang, pola perencanaan berjenjang dari bawah ke atas (*bottom up*) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa bisa didengar. Kita mengenal proses Musrenbangdes (Musyawarah perencanaan pembangunan desa), dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan, lalu diikuti rapat koordinasi pembangunan di tingkat kabupaten hingga provinsi. Keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan tersebut selesai di tingkat kecamatan, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa) kadang tidak di gubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan

muai dari musbangdes hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya implementasi perencanaan partisipatif.

Desa Maleo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Nelayan yang berorientasi pada kelautan.

Namun demikian masih banyak masyarakat yang dikategorikan dalam ekonomi rendah. Sarana prasarana di desa Maleo masih banyak yang kurang maksimal. Seperti misalnya masalah infrastruktur jalan masih banyak yang perlu perbaikan, karena kondisi jalan yang berlobang dan berlumpur saat hujan. Kondisi jalan yang rusak dan berlobang ini dialami hampir semua dusun di desa Maleo. Fasilitas kantor yang kurang memadai dikarenakan keterbatasan dana menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Aparatur pemerintah desa juga mengalami keterbatasan dalam memberikan pelayanan, terlebih lagi dengan minimnya keuangan desa. Selain itu terjadi kesenjangan terhadap gaji aparat yang dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding dengan jam kerja yang menuntut para aparat harus bekerja setiap hari. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja para aparat dalam meningkatkan pembangunan di desa Maleo, dan yang menjadi inti permasalahan yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah sarana air bersih, serta pembangunan

desa Maleo masih tergolong lambat. Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“PerencanaanPartisipatifdalamPembangunanDi Desa Maleo Kecamatan Paguat KabupatenPohuwato”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Proses Perencanaan partisipatif dalampembangunan di Desa Maleo, Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui Bagaimana Proses Perencanaan Partisipatifdalam pembangunan di Desa Maleo, Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan bagi pemerintah Desa Maleo serta pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato sebagai aparaturn pemerintahan yang mengurus kepentingan masyarakat agar kiranya mengoptimalkan program-program pembangunan khususnya pembangunan fisik desa.

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Unisan Gorontalo.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan Pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu perencanaan dan pembangunan. Pengertian perencanaan sangat beraneka ragam, yang dipengaruhi oleh sudut-sudut pandang dan kepentingan yang diharapkan. Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson dalam Diana Conyers, (1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Sondang. P. Siagian mendefenisikan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan ditentukan (Siagian, 1980). Dan Khairuddin mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992:47)

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan pada hakekatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki

serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Kajian mengenai perencanaan ini sangat relevan mengingat sumber daya manusia semakin dilihat sebagai sumber daya utama bagi kemampuan adaptif dan kompetisi dalam setiap aktivitas kehidupan.

Dengan demikian di dalam perencanaan ataupun perencanaan pembangunan perlu diketahui lima hal pokok. *Pertama*, adalah permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara atau masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya. *Kedua*, adalah tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai. *Ketiga*, adalah kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif yang terbaik. *Keempat*, penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit. *Kelima*, jangka waktu pencapaian tujuan. Dalam penetapan tujuan dan terutama dalam mencapai tujuan tersebut, ada tiga unsur penting dari perencanaan yang meminta perhatian yaitu perlunya koordinasi, terdapat konsistensi antara berbagai variabel sosial ekonomi suatu masyarakat, dan penetapan skala prioritas.

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus segera diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Karena perencanaan dapat menjadi faktor kunci dari pencapaian keberhasilan, oleh karena itu perencanaan harus memperhatikan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi

baru secepat mungkin. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (*decision making*), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan masalah tertentu. Keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan sumber daya yang tersedia. Conyers (1991) mengatakan bahwa perencanaan adalah sebagai suatu proses secara terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang.

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa depan dengan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. (G. Terry dalam H.R Kusmiadi, 1995). Dari pengertian sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting yakni, tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu (kapan, bilamana rencana tersebut akan dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27).

Menurut Abe (2005:28) Suatu perencanaan yang baik mampu menetapkan pilihan yang disesuaikan dengan situasi dengan kondisi yang ada. Selain itu proses membuat rencana akan bermakna sebagai proses menentukan ke arah mana sumberdaya yang ada hendak (sebaiknya) digunakan. Ketepatan dalam menentukan alokasi sangat ditentukan oleh pembacaan atas kualitas dan kuantitas sumberdaya yang ada dan pembacaan situasi eksternal.

Dengan demikian ada empat alasan mengapa perencanaan menjadi sangat dibutuhkan (Abe, 2005:29), yaitu:

1. Adanya kebutuhan untuk menentukan langkah-langkah ke depan yang tepat, yakni adanya kesesuaian antara sumber daya, situasi eksternal dan momentum
2. Agar dapat membuat bacaan (pembacaan) atas situasi yang tepat sehingga daripadanya bisa diambil makna positif dan negatifnya yang akan menjadi dasar (pertimbangan) dalam menentukan langkah ke depan
3. Agar dapat menentukan alokasi sumber daya yang tepat, sehingga hasil yang diperoleh merupakan optimalisasi atas sumber daya yang tersedia
4. Agar bisa dibayangkan dengan lebih jelas mengenai apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana mengantisipasi perkembangan yang tidak terduga.

Seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan kegiatan baru, atau alokasi keuangan untuk kegiatan-kegiatan lama, tanpa menilai kembali kualitasnya secara kritis. Acapkali lebih banyak sumbangan dapat diberikan kepada pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan daripada memulai yang baru. Hasibuan dalam Ketaren (2006:70), telah merumuskan unsur-unsur perencanaan sebagai berikut

1. Sifat rencana itu sendiri sebagai dasar pelaksanaannya sudah mengandung ciri-ciri yang berorientasi pada pelaksanaan, dalam arti memungkinkan untuk pelaksanaannya dan perencanaan tersebut sudah diperhatikan kapasitas administratif dalam pelaksanaannya
2. Proses-proses perencanaan tetap mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas, oleh karena itu harus dilakukan terus menerus reformulasi rencana dan reimplementasi dalam pelaksanaannya
3. Mengusahakan perencanaan dapat seoperasional mungkin
4. Adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan yang mengusahakan keserasian antara pelaksana dan perencanaan
5. Diperlukan adanya sistem pelaporan dan evaluasi dalam proses perencanaan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran. Dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana.

Pembangunan dalam perencanaan itu sendiri adalah merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara sistematis dan tersencana. Menurut Diana Conyers (1994: 5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah

dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Mengenai pengertian pembangunan, ada banyak definisi yang berbeda beda dari para ahli seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan yang lainnya. Namun secara umum pembangunan adalah merupakan proses melakukan perubahan.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto, 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguhan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Siagian (Siagian, 1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation*

building)”. Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997:9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:14) Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahap awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis daam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak, dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengatasi tuntutan perubahan baik eksternal maupun interna, serta disusun berdasarkan fakta riil dilapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan, maka terbentuk konsep perencanaan pemangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyrakat, pemerintha dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas. Secara umum perencanan pembangunan daerah didefenisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang menengah dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:15) Ciri- ciri perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini meliputi hal hal sebagai berikut:

1. Menghasilkan program- program yang bersifat umum
2. Analisis perencanaan bersifat makro atau luas.
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk jangka menengah dan panjang
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan impersal namun tetap memiliki spesifikasi yang jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangun jangka pendek (satu tahun).

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaanya tidak menyimpang dari tujuan (Albert Waterson).

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,

- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pennganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

2.2. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan terdapat tahapan- tahapan yang tentunya sangat menunjang dan membantu kelancaran suatu perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran. Seringkli terdapat kesalahpahaman seakan-akan perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yangg terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Adapun proses Perencanaan yang ada di Indonesia sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 adalah :

1) Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah.

- (a) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur. (b) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan

rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. (c) Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. (d) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil musrenbang kabupaten.

2) Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai PERDA, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan kepala daerah.

3) Pengendalian Pelaksanaan rencana Pembangunan

Dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4) Evaluasi Pelaksanaan rencana

Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian

sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan

Menurut Bintoro Tjokoroamidjojo (1985), tahap- tahap dalam suatu proses perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (*review before take off*) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*). Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang (masih) dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada dan potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan.
 - b. Perkiraan keadaan masa lalu yang akan dilalui rencana. Sering juga disebut dengan *forecasting* dalam hal ini diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.
 - c. Penetapan tujuan rencana (*Plan Objectives*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana. Dilihat dalam suatu kerangka yang

lebih luas berdasar atas azas konsistensi dan prioritas. Pada umumnya hal ini sebaiknya dilakukan melalui penyusunan suatu kerangka menyeluruh atau kerangka makro. Dengan demikian dapat dilihat implikasi dari hubungan-hubungan antara berbagai variabel dan parameter dalam bidang ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

- d. Identifikasi kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijakan atau *policy* mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan untuk bisa lebih operasionalnya rencana kegiatan-kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasar alternatifnya yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasar *opportunity cost* dan skala prioritas. Bagi proyek-proyek pembangunan identifikasinya didukung oleh *feasibility studies* dan survei-survei pendahuluan.
- e. Tahap terakhir dari penyusunan rencana ini adalah tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan di sini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan dibidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik. Di sini diusahakan pula penyerasian dengan perencanaan pembiayaan secara umum daripada program-program perencanaan yang akan dilakukan.

2) Penyusunan Program Rencana.

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan menentukan program-program pembangunan.

Bahkan daripada masing-masing proyek-proyek pembangunan sebagai bagian ataupun tidak daripada program-program tersebut terdahulu. Seringkali dipakai disini suatu program kegiatan dan pembiayaan yang konkrit daripada program-program atau proyek-proyek pembangunan tersebut dalam *project plan* yang dituang daam *projectform*. Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan alat evaluasi rencana yang penting. Perlu disebutkan bahwa seringkali pengesahan rencana ini dilakukan sebagai penutup tahap ini. Dengan demikian, rencana memiliki kedudukan legal untuk pelaksanaannya. Seringkali tahap ini perlu dibantu dengan penyusunan suatu *flow chart*, *operation-plan* atau *network plan*.

- 3) Tahap berikutnya adalah Pelaksanaan Rencana. Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan anatara tahap konstruksi, dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan kerana sifat kegiatan usahanya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kebijakan-kebijaksanaan pun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus memerlukan penyesuaian.
- 4) Tahap selanjutnya adalah tahap pengawasan atas pelaksanaan rencana. Tujuan dari pengawasan adalah:
 - a. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya.
 - b. Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya.

c. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan.

Untuk ini diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan *feed back* yang baik daripada pelaksanaan rencana

5) Evaluasi juga penting dalam proses perencanaan guna membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent review*. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana, yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil-hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri.

Apabila disebutkan dalam penelaahan proses pembangunan ini, maka hal tersebut hanya menunjukkan urutannya saja, sebab didalam kegiatan sebenarnya tahap-tahap ini beberapa diantaranya mungkin dilakukan secara bersama-sama. Misalnya saja bersamaan dengan pelaksanaan rencana pembangunan sebelumnya sudah dimulai penyusunan rencana masa berikutnya. Identifikasi kebijaksanaan atau proyek pembangunan bisa dilakukan sembarang waktu biarpun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan siklus perencanaan pembiayaannya. Hal terakhir ini karena biasanya perencanaan pembiayaan terkait dengan siklus tahun anggaran yang berlaku. Demikian pula tinjauan yang berjalan juga dilakukan terus menerus atau periodik. Bahkan hal ini dapat memberi pengaruh untuk penyusunan kembali rencana sebelum jadwal waktu selesainya rencana seperti yang ditetapkan semula.

Kunarjo (2002:23) berpendapat bahwa dalam sebuah perencanaan yang baik maka harus mempunyai persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Didasari dengan tujuan pembangunan
2. Konsisten dan realistis
3. Pengawasan yang kontinu
4. Mencakup aspek fisik dan pembiayaan
5. Memahami berbagai perilaku dan hubungan antarvariabel ekonomi
6. Mempunyai Koordinasi yang baik

2.3. Partisipasi Masyarakat

2.3.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan

pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan Bintoro bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; (3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil. Pandangan Bintoro di atas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan proses selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, (Siagian, 1989:108) menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses dalam memilih alternatif yang diberikan semua unsur masyarakat, lembaga formal, lembaga sosial dan lain-lain. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu, dan alternatif mana yang terbaik yang harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab, sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak-pihak tertentu saja.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan perencanaan dapat menghabiskan banyak waktu akibat banyaknya kepentingan masyarakat yang terlibat. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dalam benturan berbagai kepentingan. Solusi yang paling sering ditempuh untuk menyelesaikan benturan kepentingan tersebut adalah mengambil keputusan yang menguntungkan lebih banyak pihak dan tidak ada pihak yang menjadi korban. Strategic planning

difokuskan pada masalah masalah yang menjadi prioritas dan disusun ke dalam rencana aksi (*action plan*) dengan jangka waktu dan rencana pembiayaan yang realistis.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya. Selain itu angan-angan publik yang muncul dalam suatu masyarakat belum tentu mencerminkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kebutuhan masyarakat sangat ditentukan sejauh mana masyarakat menyerap informasi dan memahami dirinya sendiri dalam rangka merumuskan kebutuhannya. Hal ini sering terjadi di masyarakat terutama saat perumusan program pembangunan yang dilakukan dalam musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan sampai kabupaten. Masyarakat menginginkan pembangunan tanpa menyadari kegunaanya bagi peningkatan kesejahteraan mereka, atau akan bisa menyelesaikan masalah riil yang dihadapi selama ini (kemiskinan, pengangguran, pemerataaan, dsb.).

Untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan persepsi dari pemerintah terhadap pembangunan. Pembangunan harus merupakan suatu kewajiban moral dari seluruh bangsa, bukan ideologi baru yang harus diamankan. Untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembnagunan diperlukan sikap toleransi dari pemerintah terhadap kritikan dan lain-lain, karena kritik tersebut merupakan salah satu bentuk dari partisipasi.

Slamet (1993:24) mengemukakan bahwa syarat-syarat yang diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi adalah:

- a. Adanya kesempatan untuk ikut membangun atau ikut dalam pembangunan
- b. Adanya kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut
- c. Adanya kemauan untuk berpartisipasi

Menurut Kartasubrata (1986), dorongan atau rangsangan untuk berpartisipasi mencakup faktor-faktor kesempatan, kemauan, kemampuan, dan bimbingan. Kesempatan untuk berpartisipasi hendaknya tidak hanya diberikan pada waktu pelaksanaannya saja tetapi juga mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian dan kemudian distribusi hasilnya. Pendapat senada diungkapkan oleh Sahidu (1998) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dapat ditingkatkan melalui peningkatan dan pengembangan kemauan, kemampuan, dan kesempatan berpartisipasi, karena perilaku partisipasi merupakan hasil interaksi faktor-faktor keamanan, kemampuan, dan kesempatan.

Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan, pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan itu sendiri

2.3.2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam proses pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang sekiranya dapat menunjang keberhasilan dari sebuah proyek/ program pembangunan. Secara umum partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut (Huraerah, 2008:56):

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan prasarana.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam pemnagunan, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan, dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk berbagai bentuk usaha.

5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Sementara itu Ndraha (1990) membagi bentuk atau tahap partisipasi menjadi enam (6) bentuk/tahapan, yaitu:

1. Partisipasi dalam/ melalui kontak dengan pihak lain (*contact chance*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Pamudji (1997) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi, terdiri dari ;

1. Partisipasi dalam perencanaan kegiatan, yaitu keterlibatan dalam bentuk kehadiran, menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu keterlibatan dalam bentuk penyediaan dana, pengadaan sarana, dan berkorban waktu dan tenaga sejak persiapan kegiatan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan yang berupa pemeliharaan hasil-hasil kegiatan.
3. Partisipasi dalam pengendalian kegiatan monitoring, pengawasan, dan evaluasi, yaitu keterlibatan warga masyarakat dalam bentuk penyusunan pedoman pengendalian (melalui survei partisipatif), pengumpulan data (melalui survey partisipatif), dan penilaiannya (melalui penilaian aspiratif).
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan.

Senada dengan hal tersebut bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan (*idea planning stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaannya (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang

ataupun material/ barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Sahidu (1998) menyatakan berpartisipasi dalam pembangunan bukan hanya mengerahkan tenaga kerja secara sukarela dalam proses pembangunan, akan tetapi merupakan *input* dan sekaligus sebagai *output* pembangunan. Berpartisipasi dalam pembangunan berarti mengambi bagian atau berperan serta dalam pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pendapat senada diungkapkan oleh oleh Soetrisno (1995) yang mengatakan bahwa partisipasi rakyat dalam kegiatan pembangunan bukanlah kegiatan mobilisasi dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988), bentuk-bentuk partisipasi meliputi:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang

3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat
5. Sumbangan dalam bentuk kerja
6. Aksi Massa
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga
8. Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Adapun jenis-jenis partisipasi dapat diklasifikasikan meliputi (1) Pikiran; Tenaga; (3) Pikiran dan Tenaga; (4) Keahlian; (5) Barang; dan (6) Uang. Dari jenis jenis Partisipasi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pikiran. Pikiran merupakan jenis Partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
2. Tenaga. Merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
3. Pikiran dan Tenaga. Merupakan jenis partisipasi pada pada level ketiga dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya konteks partisipasi tersebut berada pada suatu lembaga atau partai.

4. Keahlian. Merupakan jenis partisipasi pada level keempat dimana dalam hal tersebut keahlian merupakan hal yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan
5. Barang. Merupakan jenis partisipasi pada level kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan
6. Uang. Merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

2.4. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisipasi aktif masyarakat lebih dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan partisipatif. Atau dengan kata lain pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan potensi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. (Adisasmita, 2006:38). Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai suatu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat, yang bila dirumuskan dengan tanpa melibatkan masyarakat akan sangat sulit memastikan bahwa rumusannya akan berpihak kepada rakyat.

Melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembangunan daerah akan membawa tiga dampak penting (Abe, 2005:91) :

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat.
2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah yang terlibat akan semakin baik.
3. Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Dengan semangat reformasi dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat, maka masyarakat diharuskan untuk melakukan tindakan-tindakan aktif (peran partisipatif) guna mengawal seluruh rangkaian proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan, baik di tingkat desa, kecamatan ataupun kabupaten, karena masyarakat sekarang ini sudah bukan lagi berposisi sebagai obyek pembangunan semata, tetapi juga menjadi subyek pembangunan.

Berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, partisipasi masyarakat penting dalam sistem pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat berguna untuk: (1) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (2) Menciptakan rasa memiliki pemerintahan; (3) Menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum; (4) Mendapatkan aspirasi masyarakat dan; (5) Sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Sedangkan Moeljarto (1987) memberikan penjelasan tentang arti pentingnya perencanaan partisipatif yaitu, sebagai berikut :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan memulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki
5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan
6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
10. Partisipasi dipandang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Menurut Diana Conyers (1991) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting karena:

1. Partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya proses pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum, karena merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur / komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat dengan demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang luas menjadi semakin baik dan meningkat. Lagipula, pola pendekatan perencanaan pembangunan ini sekaligus menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang sangat baik bagi masyarakat. Hal ini tercermin bagaimana masyarakat secara menyeluruh mampu melakukan proses demokratisasi yang baik melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif memiliki beberapa prinsip (Chozin dkk, 2010:58) yaitu :

1. Merupakan lingkaran proses belajar sejak perencanaan hingga evaluasi
2. Bersifat literatif (perbaikan terus-menerus), memanfaatkan umpan balik
3. Melibatkan wakil pihak berpengaruh (yang mempengaruhi/ *stakeholder*)
4. Berdasarkan fakta (kenyataan) bukan asumsi/dugaan
5. Bersifat objektif bukan subjektif
6. Mendahulukan konsensus bukan suara paling menonjol
7. Semua peserta aktif ambil bagian
8. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi (hak peserta sama)
9. Mementingkan proses bukan sekedar *output*
10. Berorientasi hasil dan
11. Program adalah milik masyarakat.

Perencanaan pembangunan secara demokratis partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan. Artinya masyarakat diberikan peluang menggunakan hak-hak politiknya untuk memberikan masukan dan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Metode yang kedua ini diharapkan dapat memberikan hasil-hasil perencanaan pembangunan yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ataupun sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, karena memang warga masyarakat langsung menyampaikan aspirasi kebutuhannya.

2.5. Teori Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Wahab (1990:51) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu,

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan pandangan di atas dapat dirumuskan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun positif.

Setelah sebuah kebijakan publik dibuat atau dirumuskan, baik menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan, maka tahapan selanjutnya adalah tindakan pelaksanaan atau implementasi. Sebab kebijakan publik yang tidak diimplementasikan hanya menjadi sebatas kumpulan aturan-aturan pemerintah yang tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu Wahab (1990:51) mengemukakan bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Terdapat beberapa definisi yang coba di angkat oleh ahli tentang implementasi, namun konsepnya tetap sama yaitu merupakan rangkaian proses penerjemah dari kebijakan yang direspon berupa aksi atau tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan yang dimaksud. Dalam mengimplementasikan kebijakan, diperlukan suatu input yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan, sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya keuangan

yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan, komitmen pelaku-pelaku yang terkait.

Pada dasarnya semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat memiliki harapan yang sama bahwa suatu kebijakan harus berhasil dalam proses implementasinya. Keberhasilan implementasinya dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, sasaran, kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak dan hasil yang baik bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi serta dalam implementasinya mampu menyentuh kebutuhan kepentingan publik.

Untuk mengimplementasikan kebijakan, secara rinci Casley dan Kumar yang dikutip oleh Wibawa, dkk menawarkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut: (Wibawa, dkk 1994:16)

1. Identifikasi Masalah. Batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan dipisahkan masalah dari gejala yang mendukungnya. Rumuskan sebuah hipotesis;
2. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut. Kumpulan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis;
3. Kaji hambatan dalam pembuatan keputusan. Analisalah situasi politik dan organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan.
Pertimbangkan berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen. Hindarkan diskusi yang tidak realistis;
4. Kembangkan solusi-solusi alternatif;

5. Perkirakan solusi yang paling banyak. Tentukan kriteria dengan jelas dan terapkan (applicable) untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif; dan
6. Pantaulah terus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya.

Suatu kebijakan (publik) dikatakan berhasil bila dalam implementasinya mampu menyentuh kebutuhan kepentingan publik. Pertanyaannya adalah ketika suatu kebijakan tidak lagi memenuhi kepentingan publik, bagaimana bisa disebut sebagai kebijakan yang berhasil?. Implementasi kebijakan akan gagal disebabkan beberapa faktor: *Pertama* adalah informasi karena kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana isi kebijakan itu. *Kedua* adalah isi kebijakan, dimana implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samanya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern maupun ekstern kebijakan itu sendiri. *Ketiga* adalah dukungan, dimana implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pelaksananya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. *Keempat* yaitu pembagian potensi, dimana hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

2.6. Pembangunan Desa

2.6.1. Pengertian Pembangunan Desa

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, maka Desa punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul Desa, kewenangan yang diserahkan Kabupaten dan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah serta urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa. UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (penyelenggaraan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Agar pembangunan di desa dapat menyentuh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang

lingkup pengembangannya. Berikut penjelasannya mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006:18-20) :

1. Pembangunan Pedesaan seharusnya menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (*sustainable*).
2. Sasaran pembangunan pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan ketrampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuatan kelembagaan.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan perkotaan (*inter rural-urbanrelationship*).

Namun dalam melakukan pembangunan desa ini, banyak sekali hambatan yang dapat ditemui. Hambatan-hambatan itu, menurut Butterfield (dalam Ndraha, 1982:91) adalah:

- a. Perbedaan persepsi. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pedesaan. Sehingga

terjadi permasalahan dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa memiliki persepsi yang buruk terhadap pembangunan yang ada di desanya.

- b. Kesukaran memilih model pembangunan yang tepat. Mungkin kesulitan ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih bingung dalam menerima hal-hal baru, sehingga pemerintah pun menjadi bingung pula dalam menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya diterapkan
- c. Batasan waktu. Dimana program pembangunan pedesaan lambat sekali kelihatan hasilnya, sehingga pemerintah sering merasa kurang sabar dalam menangani usaha pembangunan desa.

Persoalan praktis. Hambatan ini muncul bila hal-hal dalam tahap pelaksanaannya membuat pembangunan desa terhambat, misalnya saja kurangnya teknologi, kurangnya pengelola yang terlatih dan sebagainya. Memperhatikan kekurangan dan kegagalan perencanaan pembangunan di desa pada masa lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendekatan pembangunan desa atau pedesaan yang sesuai dengan kompleksitas pembangunan serta aspirasi masyarakat.

2.6.2. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Ada dua arahan yang tercakup dalam perencanaan. Pertama, arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-

langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan dan dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa : politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedua, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan di desa di dorong untuk tercapainya keseimbangan antara perencanaan bottom up dan top down, serta mengembangkan perencanaan partisipatif, (Chozin, dkk, 2010:35)

Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan pada tingka desa dilakukan dengan perencanaan partisipatif yaitu: (Chozin dkk, 2010:36)

1. Pendekatan Kelompok

Pendekatan kelompok adalah perencanaan desa yang disusun oleh masyarakat secara bersama, dalam arti bahwa seluruh masyarakat terlibat dalam menyusun rencana.

2. Metode Perencanaan

Metode perencanaan yang digunakan untuk perencanaan desa adalah suatu metode yang mudah dimengerti dan digunakan oleh masyarakat. Metode

perencanaan ini berangkat dari permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat dan dilaksanakan secara bertahap langkah demi langkah

3. Menggunakan alat peraga

Alat bantu diskusi untuk meakukan perencanaan dengan pendekatan kelompok adalah yang memeragakan semua hasil diskusi pada papan tancap dan kartu-kartu berwarna. Semua pernyataan peserta diskusi dituliskan pada kartu-kartu berwarna dan ditancapkan di papan.

Diskusi dalam proses perencanaan pembangunan desa dipimpin oleh seorang moderator. Moderator harus dapat berperan sebagai katalisator untuk merangsang terjadinya proses diskusi yang partisipatif, menghimpun dan menghargai pendapat peserta, sebagai juru penengah serta mampu mempertimbangkan berbagai pendapat untuk dapat merumuskannya dalam suatu kesimpulan.

2.7.Kerangka Pemikiran

Perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran. Dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana.

Mengenai pengertian pembangunan, ada banyak definisi yang berbeda beda dari para ahli seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan yang lainnya. Namun secara umum pembangunan adalah merupakan proses melakukan perubahan. Untuk lebih memberikan batasan yang jelas berkaitan dengan penelitian ini maka penulis menggambarkan melalui skema berikut ini :

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Perencanaan Partisipatif serta Implementasi Pembangunan Lokasi Penelitian ini bertempat di Di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, direncanakan selama 2 bulan.

3.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang Bagaimana Proses Perencanaan Partisipatif dalam pembangunan di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato?"

3.3 Definisi Operasional

Dalam rangka memudahkan proses analisa data yang diperoleh, maka definisi konsep yang ada dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator agar mampu menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya. Adapun operasionalisasi konsep dalam penulisan ini terfokus pada:

- 1.) Penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Tinjauan keadaan.
 - b. Perkiraan keadaan masa lalu yang akan dilalui rencana.
 - c. Penetapan tujuan rencana
 - d. Identifikasi kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.

e. Tahap terakhir dari penyusunan rencana ini adalah tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan di sini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan dibidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik. Di sini diusahakan pula penyerasian dengan perencanaan pembiayaan secara umum daripada program-program perencanaan yang akan dilakukan.

2). Penyusunan Program Rencana.

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan menentukan program-program pembangunan.

3). Tahap berikutnya adalah Pelaksanaan Rencana. Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan anatara tahap konstruksi, dan tahap operasi.

4). Tahap selanjutnya adalah tahap pengawasan atas pelaksanaan rencana.

5). Evaluasi juga penting dalam proses perencanaan guna membantu kegiatan pengawasan.

3.4 Informan

- Kepala Desa
- Pemerintah Desa Maleo,
- BPD serta
- sejumlah tokoh masyarakat

3.5 Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan tehnik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan dan melalui pembagian kuesioner.
2. Data diperoleh melalui studi pustaka (*Library Search*) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi maupun perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, dan beberapa data penting lainnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah

pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kondisi Desa

4.1.1. Sejarah lokasi penelitian

Desa Maleo dikenal dengan desa yang subur dan tumbuhan yang menghijau diatas tanahnya yang terkenal di Provinsi Gorontalo. Sekolompok masyarkat yang rukun dan damai, meskipun masih dalam kondisi kehidupan yang sangat ekonomis, bisa menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Desa Maleo terbentuk dari pemekaran dari Kelurahan Libuo, desa ini resmi dinyatakan sebagai desa definitif yakni pada tahun 2003 atas inisiatif dari para tokoh masyarakat yakni dari golongan para tokoh pemuda desa. Saat ini luas desa Maleo 30,16 km dengan jumlah penduduk desa Maleo sampai dengan tahun 2019 yakni sebanyak 1379 Jiwa, atau sama dengan 435KK yang terdiri dari tiga dusun yakni dusun utara, dusun tengah dan dusun selatan. Sebageian besar penduduk desa Maleo memeluk agama Islam dengan jumlah suku yang ada di Desa ini antara lain suku Gorontalo, Kaili, Bugis, Minahasa, dan Sangir. Desa Maleo termasuk salah satu Desa yang ada diwilayah kecamatan Paguat dengan batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hulawah Kecamatan Buntulia

Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Libuo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palopo / Desa Teratai Kec. Marisa

Mata pencaharian utama masyarakat desa ini adalah petani (petani jagung dan kelapa), nelayan, buruh, dan tukang. Luas perkebunan adalah 266 ha, luas lahan pertanian jagung adalah 243 ha.dengan jumlah kelompok tani sekitar 11 kelompok. sedangkan mata pencaharian lain masyarakat adalah pedagang (kios), dan meubel. Adanya potensi sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan masyarakat, sampai saat ini keharmonisan antar warga dan sistem pemerintahan berjalan dengan baik.

Mayoritas mata pencaharian penduduk sangat berpengaruh dengan lajunya perkembangan ekonomi desa ini, yang disebabkan oleh adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dengan mengadakan sosialisasi pembibitan,pengukuhan,dan pengelolaan di bidang pertanian sehingga bisa mengasah keahlian para petani dan perkebunan di Desa Maleo. Desa Maleo pada tahun 2016 telah mengadakan pemilihan kepala Desa secara langsung dan yang terpilih sebagai kepala desa adalah Bapak Ram Botutihe untuk Periode 2016-2022.

❖ Sejarah Pemerintah Desa

Tabel 1.Sejarah Pemerintah Desa

NAMA-NAMA KEPALA DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA MALEO

NO	Periode	Nama Kepala Desa Maleo	Keterangan
1	2003 – 2008	Yunus M. Abas	Definitif
2	2008 – 2014	Ram Botutihe	Definitif

3	2014 - Juli- 2016	Tahir Ibura	Penjabat
4	Agustus 2016 – 2022	Ram Botutihe	Definitif

❖ Sejarah Pembagunan Desa

Tabel 2. Sejarah Pembagunan Desa

NO	Tahun	Kegiatan Pembagunan	Keterangan/Pelaksana
1	1969	Pembangunan Mesjid Arrayan	Swadaya
2	1980	Masjid Al-Manan	Swadaya
3	1982	Pembanguna Sekolah SDN 13 Paguat	APBD
4	2007	Pembangunan Sekolah TK	PNPM
5	2007	Pembangunan Rumah layak Huni 7 Unit	APBD II
6	2008	Pembangunan Rumah Layak Huni 6 unit	APBD II
7	2009	Pembangunan Rumah Sehat 3 Unit	ADD
8	2010	Pembangunan Rumah Sehat 3 Unit	ADD
9	2010	Pembangunan sekolah PAUD 1 Unit Dsn III	PNPM
10	2010	Pembagunan Wastavel 3 unit	PNPM
11	2010	Pembangunan Menara air	APBN
12	2010	Pembangunan Hidran 6 unit	APBN
13	2010	Pembangunan Rumah Appoh 1 unit	APBN
14	2010	Pembangunan Bak air Lahan Dangkal 1 unit	APBN
15	2010	Pembangunan Sekretariat BPD 1 unit	ADD

16	2010	Pembangunan Sekretariat PKK	ADD
17	2011	Pembangunan Rumah Layak Huni I unit	APBD I
18	2011	Pembangunan Rumah Sehat 3 unit	ADD
19	2011	Pembangunan Jalan Tani	APBN
20	2012	Pembangunan Rumah Sehat 3 unit	ADD
21	2012	Pembangunan Jalan Rabat Beton	PNPM
22	2013	Pembangunan Rumah Sehat 3 unit	ADD
23	2013	Pembangunan Sekolah Paud I unit Dsn I	PNPM
24	2014	Pembangunan Rumah Sehat 3 Unit	ADD
25	2014	Pembangunan Rumah layak Huni 6 unit	APBN
26	2014	Pembangunan Jalan Usaha Tani	APBN
27	2014	Pembangunan Poskesdes I unit	PNPM
28	2014	Pembangunan Jembatan	APBN
29	2015	Pembangunan Plat Deker	APBN
30	2015	Pembangunan Rumah Sehat 3 unit	ADD
31	2015	Pembangunan Lapangan Voli Ball	APBN
32	2015	Pembangunan Jamban 32 Unit	APBN
33	2015	Rehabilitas Bangunan Kantor Desa	ADD
34	2015	Pembangunan Tempat Air isi ulang	APBN
35	2015	Pembangunan pagar Poskesdes	APBN
36	2015	Pengadaan pintu pagar sekolah paud	APBN
37	2016	Pembangunan Rumah Sehat 3 Unit	APBN

38	2016	Pembangunan Pagar Kantor Desa	ADD
39	2016	Pembangunan Jalan Rabat Beton	APBN
40	2016	Pembangunan Sanggar Tani	APBN
41	2016	Perbaikan Lantai TK	APBN
42	2016	Pembangunan Jamban 25 Unit	APBN
43	2016	Pembangunan MCK 2 Unit	APBN
44	2016	Pengadaan Tehel Kantor Desa	ADD
45	2016	Pengadaan Flapon Kantor Desa	ADD
46	2016	Pengadaan Jendela Kantor Desa	ADD
47	2017	Pembangunan Kolam Ikan	APBN
48	2017	Pembangunan Drainase	APBN
49	2017	Pembangunan Rumah Komunal	APBN
50	2017	Pembangunan MCK 1 Unit	APBN
51	2018	Pembangunan Parkir Motor Obyek Wiasata	APBN
52	2018	Pembangunan Air Bersih	APBN
53	2018	Pembangunan Rumah Komunal	APBN
54	2019	Pembangunan Jamban	APBN
55	2019	Pembangunan Penampung Air Bersih	APBN

Dusun sebagian dari satuan wilayah pemerintah Desa Maleo memiliki fungsi yang sangat strategis terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungan dengan pemerintah Desa.

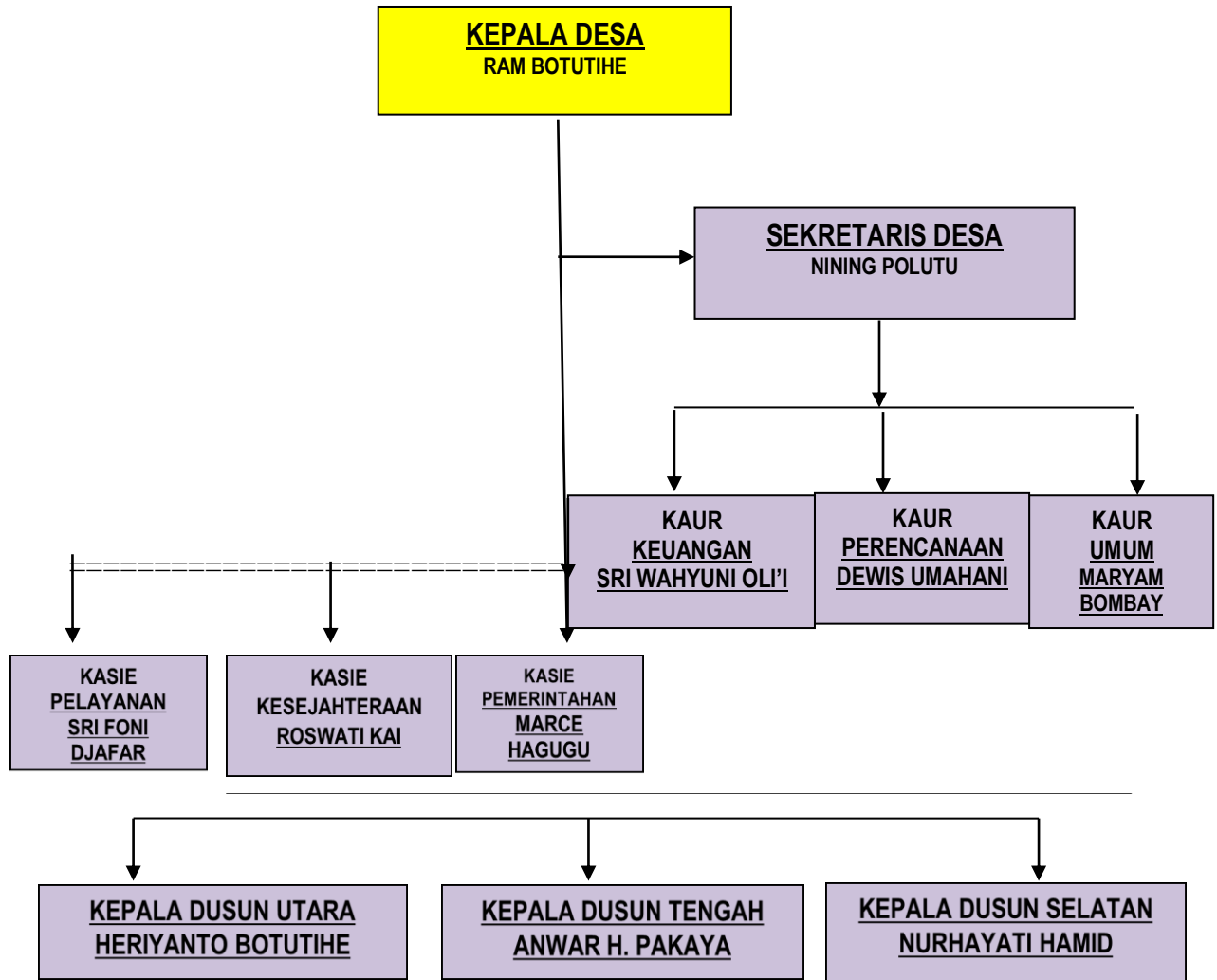
4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Maleo

Struktur Kepemimpinan desa Maleo tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintah pada level di atasnya. Struktur organisasi pemerintahan desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

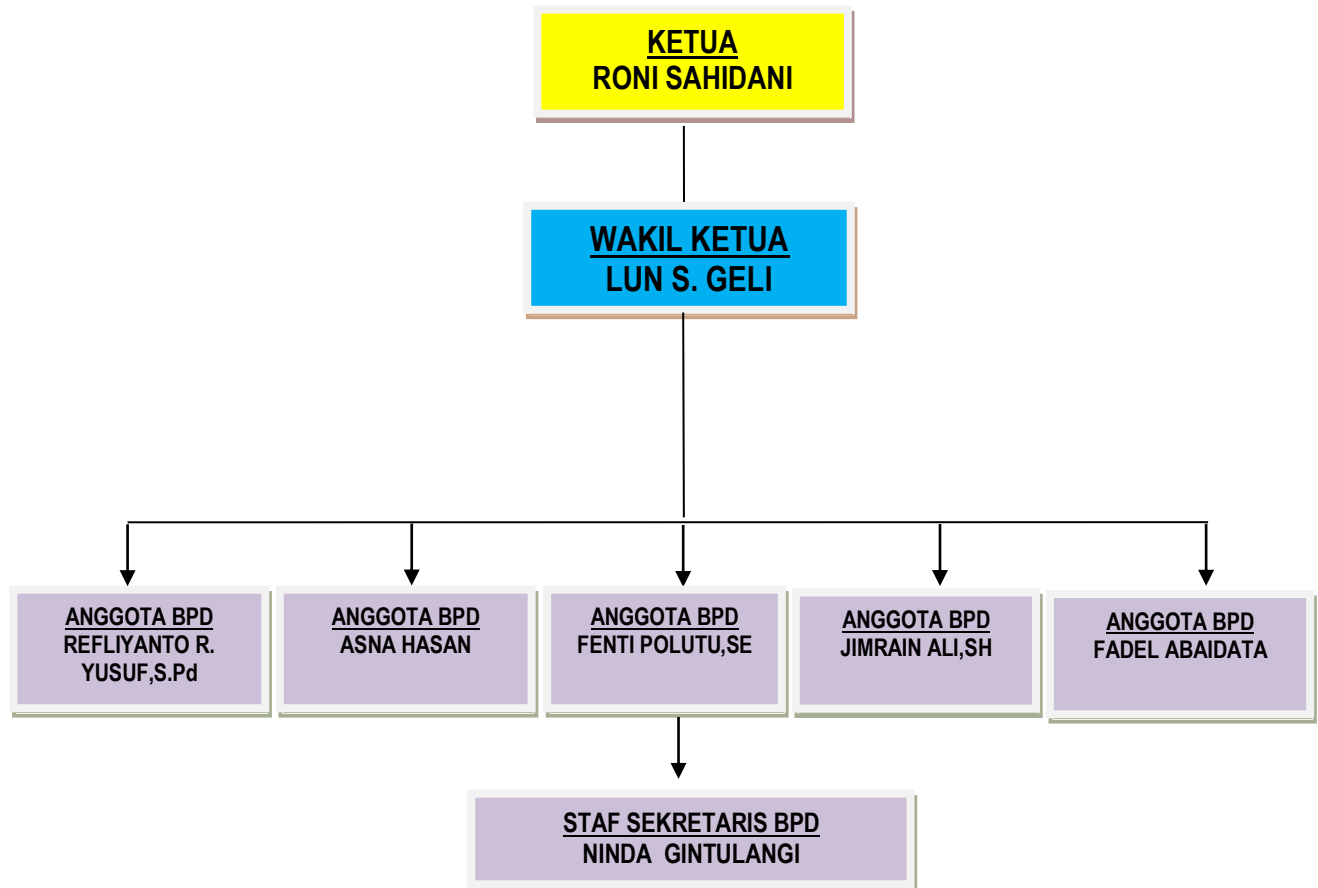
No	Nama	Jabatan	Usia	Masa Jabatan	Pendidikan
1	Ram Botutihe	Kepala Desa	45	6 Tahun	SMA
2	Nining Polutu	Sekretaris Desa	35	6 Tahun	Paket C
3	Marce Hagugu	Kepala Seksi Pemerintahan	29	6 Tahun	SMA
4	Sri Foni Djafar	Kepala Seksi Pelayanan Pembangunan	39	6 Tahun	Paket C
5	Roswati Kai	Kepala Seksi Kesjahteraan	35	2 Tahun	SMA
6	Sri Wahyuni Oli'i	Kaur Keuangan		1 Tahun	DI
7	Maryam Bombay	Kaur Umum	25	6 Tahun	SMA
8	Dewis Umahani	Kaur Perencanaan	29	6 tahun	SMA
9	Heriyanto Botutihe	Kepala Dusun Utara	19	2 Tahun	SMA
10	Anwar Pakaya	Kepala Dusun Tengah	23	3Tahun	MAN
11	Nurhayati Hamid	Kepala Dusun Selatan	45	4 Tahun	SMA

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH DESA MALEO KECAMATAN PAGUAT



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MALEO
KECAMATAN PAGUAT**



4.1.3. Aspek Geografi dan Demografi

Posisi astronomis Desa Maleo Berada di Daerah Khatulistiwa. Posisi geostrategis Desa Maleo Daerah dataran dan perairan Teluk Tomini. Kondisi/kawasan : Desa Maleo berada pada daerah pesisir pantai. Desa ini memiliki daerah yang berkategori pegunungan. Desa Maleo memiliki luas 30.16 Km² dibagi menjadi 3 Dusun Desa ini memiliki batas-batas administrasi yang antara lain :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Hulawa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk tomini
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Libuo
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Palopo / Desa Teratai

Demografi memberikan deskripsi ukuran, Struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu

Tabel Demografi Desa Maleo Tahun 2019

No	Uraian	Desa Maleo	Dusun Utara	Dusun Tengah	Dusun Selatan
1	Jumlah pendudukan				
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.379	597	416	366
	B. Jumlah kk	435	191	131	113
	C. Jumlah laki-laki	725	320	210	195

	a. 0 – 15 Tahun	216	106	61	49
	b. 16 – 55 Tahun	449	187	133	129
	c. Diatas 55 Tahun	60	27	16	17
	D. Jumlah Perempuan	654	277	206	171
	a. 0 – 15 Tahun	168	76	46	46
	b. 16 – 55 Tahun	428	179	141	108
	c. Diatas 55 Tahun	58	22	19	17
2	Kegiatan Sosial				
	A. Rumah Tangga Hampir Miskin	84	15	47	22
	B. Rumah Tangga Miskin	183	12	83	88
	C. Rumah Tangga Sangat Miskin	9	5	1	3
3	Tingkat Pendidikan				
	A. Tidak tamat SD	27	10	4	13
	B. SD	589	233	221	135
	C. SLTP	129	59	42	28
	D. SLTA	225	93	64	68
	E. Diploma/Sarjana	52	23	17	12
4	Mata Pencaharian				
	A. Buruh Tani	1	1	-	-
	B. Petani	174	98	63	13
	C. Peternak	-	-	-	-
	D. Pedagang	6	1	3	2
	E. Tukang Kayu	-	-	-	-
	F. Tukang Batu	2	-	-	2
	G. Penjahit	3	3	-	-
	H. PNS	10	7	2	1
	I. TNI/Polri	-	-	-	-
	J. Perangkat Desa	12	6	4	2
	K. Pengrajin	-	-	-	-
	L. Buruh harian Lepas	12	4	1	7
	M. Nelayan	55	12	11	32
	N. Karyawan honorer	6	3	2	1
	O. Karyawan Swasta	91	23	38	30

5	Agama				
	A. Islam	1.310	592	410	308
	B. Kristen Protestan	69	5	6	58
	C. Kristen Katolik	-	-	-	-
	D. Hindu	-	-	-	-
	E. Budha	-	-	-	-

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kependudukan.

Jumlah Usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tingkat Pendidikan

Masyarakat secara umum di Desa Maleo masih tergolong berpendidikan rendah dimana Jumlah lulusan SD masih mendominasi Masyarakat di Desa Maleo dan Jumlah Sarjana hanya terdapat 50 Orang.

3. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan petani.

4. Agama

Warga masyarakat Desa Maleo adalah terdiri atas masyarakat beragama Kristen Protestan 69 Jiwa dan Selebihnya adalah Muslim sebanyak 1.310 Jiwa.

4.1.4. Topografi

- a. Bentangan Wilayah : Pegunungan dan pesisir pantai
- b. Letak wilayah : Desa
- c. Orbitasi
 - Jarak ke Ibu kota Kecamatan :10 Km
 - Lama tempuh ke ibu kota kecamatan :10 menit
 - Jarak ke ibu kota kabupaten :11Km
 - Lama tempuh ke ibu kota kabupaten : 15 menit

4.1.5. Klimatologi

Klimatologi Gambaran keadaan iklim di Indonesia hanya dikenal ada dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Untuk musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September, dimana arus anginnya berasal dari Australia dan tidak mengandung uap air sehingga berakibat musim kemarau. Sedang musim penghujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret disebabkan oleh arus angin banyak berasal dari Asia dan samudra Pasifik yang banyak mengandung uapair sehingga berakibat pada terjadinya musim penghujan. Akan tetapi keadaan seperti ini setiap tahunnya berubah setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November. Di desa Maleo berada pada daerah yang cukup panas. Secara umum curah hujan di desa Maleo dan bahkan diseluruh wilayah Gorontalo sudah tidak menentu musim hujan atau musim panas, hal ini di pengaruhi oleh kondisi alam mengalami banyak

kerusakan. Iklim dan kondisi geografis di desa Maleo saat ini tercatat, suhu rata-rata tercatat sebesar 27- 30⁰C.

4.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Penyajian data mengacu pada tabel berikut :

Tabel Potensi Desa Tahun 2019

No	Uraian	Desa Maleo	Dusun Utara	Dusun Tengah	Dusun Selatan
1	Tanah Pekarangan	84.375 M ²	36.500 M ²	19.750 M ²	28.215 M ²
2	Potensi Tanaman Jagung	6852 Ha	2284 Ha	2284 Ha	2284 Ha
3	Potensi Tanaman Kelapa	102 Ha	50 Ha	30 Ha	22 Ha
4	Jambu Mente	5 Ha	2 Ha	2 Ha	1 Ha

4.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Deskripsi karakteristik wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan Vulkanik dan lain – lain. Penyajian data mengacu pada table berikut :

Tabel Bencana Alam Desa Maleo 2019

No	Uraian	Desa Maleo	Dusun Utara	Dusun Tengah	Dusun Selatan
1	Wilayah Rawan Banjir (Hektar)	168.750	56,250 Ha	56,250 Ha	56,250 Ha
2	Abrasi (Km)	150 Ha	0	0	150 Ha
3	Longsor	0	0	0	0

4.1.8. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDes Desa sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMDes

4.1.8.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator	T 2019	R 2019	Prosentase	P 2019
1	Jumlah Penduduk yang miskin	100 KK	100 KK		
2	Angka kriminalitas yang terjadi	0	0	0	0
3	Jumlah Penduduk yang Buta Huruf	6 Org	6 Org	100 %	0
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			75 %	
5	balita kurang Gizi		3 Org		
6	Penduduk yang memiliki lahan	150	130	95 %	
7	Penduduk yang bekerja			95 %	
8	Jumlah Grup Kesenian	0	0		0
9	Jumlah Gedung Olahraga	0	0		0

10	Jumlah Klub Olahraga	1	1	100 %	1
11	Jumlah Lapangan Olahraga	1	1	100 %	1
12	Jumlah Organisasi pemuda	1	1	100%	1
13	Jumlah Organisasi olahraga	6	6	100%	1
14	Jumlah kegiatan kepemudaan	6	6	100%	1
15	Jumlah kegiatan Olahraga	6	6	100%	1
16	Jumlah Peserta KB Aktif	213 Org	213 Org	100 %	213 Org
17	Jumlah Pertugas KB	5 Org	5 Org	100 %	5 Org
18	Jumlah Pengangguran	10 orang			
19	Jumlah sengketa Pengusaha dan pekerjaan pertahun	0	0		0

4.1.8.2. Aspek Kesejahteraan Sosial

No	Indikator	T 2019	R 2019	Prosentase	P 2019
1	anak cacat yang memperoleh bantuan	1 Org	1 Org	100 %	1 Org
2	Lansia yang memperoleh Bantuan	10 Org	10 Org	100 %	10 Org
3	warga miskin yang mendapat Bantuan	153 KK	153 KK	100 %	153 KK Org
4	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	0	0	0
5	Jumlah tenaga kerja di bawah Umur	0 Orang	0 Orang	100 %	0 Orang
6	Jumlah Tenaga kerja Perempuan	11 Orang	11 Orang		

7	Jumlah kasus kekerasan pada anak	0	0	0	0

4.1.8.3. Aspek Pelayanan Umum

No	Indikator	T 2018	R 2018	Prosentase	P 2019
1	Jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK)	3	3	100 %	0
2	Angka Partisipasi Murni PAUD/TK	50	50	100 %	60
3	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata PAUD/TK	2 : 20	2 : 20	100 %	2 : 20
4	Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SD Sederajat	1 : 25	1 : 25	100 %	1 : 25
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	90 org	90 rg	100 %	0
6	Angka Putus Sekolah (APS)SMP/MTs	27 Org	27 Org	100 %	0
7	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi Bangunan	1	1		
8	Sekolah Pendidikan PAUD/TK Kondisi Bangunan Baik	3	3		
9	Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	Org	orang	100 %	0
10	Penduduk yang berusia>15 Tahun melek Huruf(tidak Buta Aksara)	0	0		
11	Jumlah Posyandu	1	1	100 %	0
12	Jumlah kunjungan Bayi/Balita Ke Posyandu		161 Org		
13	Jumlah kunjungan Ibu Hamil KePosyandu/Puskesmas	11 Org	11 Org	100 %	15 Org

	/Pustu				
14	Jumlah Bidan	1 orang	1 Org	100 %	2 Org
15					
16					
17	Jumlah Balita Gizi Kurang	3 orang	3 orang		
18	Jumlah Balita Gizi Kurang mendapat Perawatan	0	0		
19	Jumlah RT Memiliki Jamban	219 Org	219 Org	100 %	
20	Jumlah Angka Kematian Bayi(AKB)	0	0 Org		0
21	Jumlah Angka kematian ibu (AKI)	0	0		0
22	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (KM)	3 km			
23	Presentase panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi Baik (KM)	0	0		
24	Jumlah tempat Ibadah	3 Unit	3 Unit	100 %	0
25	Rumah tinggal Bersanitasi	219 KK	219 KK	100 %	219 KK
26	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah	0	0	0	5
27	Rumah Layak Huni	36 Unit	36 Unit	100 %	
28	Panjang Jalan dilalui Roda 4 (km)	3 Km	3 Km	100 %	
29	Luas Sepanjang Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0	0	0	0
30	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	1 Unit	1 Unit	100 %	396 meter
31	Jumlah Rumah Tangga yang tersedia Air baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari	286 KK	286 KK	100 %	110 KK

32	Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada	0	0	0	0
33	Tersedianya Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kubutuhan Pokok Minimal 60 liter/Orang /hari.	315 Org	315 Org	80 %	395 Org
34	Penduduk yang ber KTP Nasional.	935orang	935orang	100 %	1000 org
35	Persentase Bayi berakta Kelahiran	95 orang	95 orang	100 %	120 Org
36	Persentase Pasangan Berakta Nikah	87 orang	87 orang	100 %	150 Org
37	Persentase Rumah tangga yang memiliki lahan bersertifikat	75 orang	75 orang	100 %	100 Org
38	Persentase Rumah tangga yang tidak memiliki tanah sebagai lahan pertanian/usaha	50 orang	50 orang	100 %	75 Org

4.1.8.4. Aspek Daya Saing

No	Indikator	T 2019	R 2019	Prosentase	P 2019
1	Koperasi aktif	0	0		0
2	Jumlah UMKM	- kelompok	- kelompok	100 %	- Kelompok
3	Jumlah BUMDes	1	1	100 %	0
4	Jumlah Warnet	0	0		0

5	Website milik pemerintah Desa	0	0		0
6	Persentase Rumah Tangga yang terjangkau TV/TV Kabel	300 KK	300 KK	100 %	350 KK
7	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita	350.000	350.000	100 %	500 KK
8	Luas wilayah produktif	290 Ha	290 Ha	100 %	295 Ha
9	Luas wilayah Industri	0	0		0
10	Luas Wilayah Kebanjiran	168,751 Ha	168,751 Ha	100 %	150 Ha
11	Luas Wilayah kekeringan	117 Ha	117 Ha	100 %	100 Ha
12	Jenis,kelas,dan Jumlah Restoran/rumah makan	0	0		0
13	Jenis,kelas,dan Jumlah penginapan/hotel	0	0		0
14	Jumlah Warga lulus SMA	163 org	163 org	100 %	170 Org
15	Jumlah warga lulus SI	31 org	31 Org	100 %	36 Org
16	Presentase Jumlah Warga Lulus S2	1 Org	1 Org		

4.2. PERENCANAANPARTISIPATIFDALAM PEMBANGUNAN

4.2.1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perencanaan Partisipatif

Dengan adanya sebagian besar masyarakat yang memahami proses perencanaan pembangunan partisipatif, walaupun dengan pengertian yang sederhana, hal ini cukup berperan penting dan berpengaruh besar terhadap jalannya pembangunan di desa Maleo, karena dengan mereka memahaminya maka mereka dengan sendirinya akan bisa menempatkan mana yang menjadi hak-haknya serta kewajiban yang harus ditunaikan demi kemajuan pembangunan. Pembangunan tanpa keterlibatan masyarakat maka hasilnya akan sia-sia, sebab keadilan dan kesejahteraan tidak akan terwujud, dengan begitu diharapkan optimalisasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif dapat terwujud di desa Maleo jika ada sinergitas antara masyarakat dengan aparat pemerintahan desa. pembangunan yang baik adalah pembangunan yang lebih berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat, oleh karena itu penting sekali perencanaan pembangunan partisipatif, atau ada keterlibatan masyarakat. Hal ini didukung oleh (AH) salah seorang tokoh masyarakat desa Maleo yaitu:

“Perencanaan partisipatif sangat penting karena seluruh komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam memajukan desa, selain itu pembangunan akan lebih tepat sasaran karena masyarakat yang lebih tau apa yang menjadi kebutuhan di lingkungan sekitarnya” (Wawancara Desember 2020).

Apabila sebagian besar masyarakat telah menyadari tentang pentingnya perencanaan pembangunan partisipatif, maka kondisi ini sangat baik untuk laju pembangunan. Masyarakat punya potensi besar untuk memajukan pembangunan di

daerahnya, karena setidaknya masyarakat tidak bersikap apatis, tinggal bagaimana pemerintah memperhatikan mereka dan bekerja sama dengan seluruh *stake holder* yang ada.

Menurut masyarakat hambatan dalam proses perencanaan partisipatif adalah sebagian besar usulan-usulan mereka tidak terealisasi dalam bentuk program khususnya pembangunan fisik misalnya perbaikan jalan di salah satu dusun di desa Maleo, penerangan jalan di dusun perluasan dan lain-lain. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Sekretaris Desa yaitu:

“Tidak semua usulan dapat terealisasi karena keterbatasan dana, karena itu dipilih yang mana menjadi prioritas dan lebih mendesak, itulah yang akan kami ajukan untuk dibawa ke forum kecamatan. Hal ini lah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif. Kami juga tidak tau apakah usulan yang kami bawa ke kecamatan bisa disetujui itu kapan, karena di kecamatan juga nanti dipilih yang mana yang menjadi prioritas kecamatan, jadi prosesnya masih lama sampai usulan itu disetujui dan dicairkan dananya.”(Wawancara Desember 2020).

Berdasarkan hal tersebut kita bisa melihat bahwa memang tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dalam pembangunan bisa terwujud. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran, ada hal-hal prioritas yang lebih didahulukan oleh pemerintah daerah misalnya di desa-desa lainnya yang dalam pembangunannya masih lebih terbelakang baik fisik maupun non fisik. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan Kepala seksi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di Kecamatan Paguat yaitu :

“Memang benar ada hambatan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif diantaranya adalah usulan-usulan masyarakat desa Maleo tidak semua dapat terimplementasi, hal ini dikarenakan pemerintah daerah mempertimbangkan mana yang lebih prioritas, karena banyak desa-desa lain yang juga harus dipenuhi

kebutuhannya, adanya keterbatasan dana menjadi pemicu hal ini. Namun jika usulan untuk tahun ini tidak gol maka dapat diajukan lagi tahun depan sampai ada pencairan dana dari Kabupaten”. (Wawancara Desember 2020).

Dari informasi di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat harus bersabar dengan kondisi yang ada, jika usulan mereka tidak dapat direalisasikan maka mereka akan menunggu tahun berikutnya sampai proyek di setujui dan dicairkan dananya oleh pihak Kabupaten. Namun jika kondisi ini berlangsung terus menerus masyarakat akan jenuh dan tidak mau berpartisipasi lagi karena hasilnya tidak juga dapat terealisasi dalam wujud pembangunan. Jika dibiarkan hal ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk bersikap apatis terhadap perencanaan pembangunan di desa Maleo.

4.2.2. Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Data ini diambil untuk mengetahui apakah di daerah tersebut memiliki pedoman tentang perencanaan partisipatif dalam pembangunan dan sejauh mana Informan mengetahui dan mengerti tentang peraturan perencanaan partisipatif yang ada di daerah tersebut. Hal ini dirasa penting karena pedoman tersebut merupakan salah satu wujud dari implementasi perencanaan partisipatif.

Masyarakat di Desa Maleo menyatakan bahwa ada pedoman perencanaan Partisipatif. Terbukti dengan adanya aturan-aturan ketika masyarakat melakukan musrenbang-des misalnya. Mereka diberitahu tentang alur-alur dalam proses perencanaan oleh pemerintah desa setempat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Desa Maleo yaitu:

“Sudah ada Pedoman Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif di desa Maleo, dengan adanya pedoman ini, kami lumayan terbantu sekali dalam melakukan perencanaan pembangunan, sehingga dapat dibuat langkah - langkah strategis

pembangunan jika ada keteraturan dalam proses perencanaan” (Wawancara Desember 2020)

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Camat Paguat yaitu,

“Sudah ada pedoman proses perencanaan partisipatif diantaranya yaitu, UU no 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawabam Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, kemudian Permendagri no66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa dimana perencanaan pembangunan Desa dimana Perencanaan Pembangunan Desa disusun dalam periode 5 tahun yaitu RPJM-Desa, RPJM Desa memuat arah kebijakan Keuangan Desa, startegi pembangunan desa, dan program kerja Desa, RPJM-Desa kemudian dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP-Desa memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan Desa, rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. RPJMD-Desa ditetapkan dengan peraturan desa, sedangkan RKP-Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa” (Wawancara Desember 2020).

Masyarakat di Desa Maleo mengaku telah ada sosialisasi perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Maleo. Masyarakat telah diberitahu oleh aparat desa tentang pelaksanaan musrenbang-des,berikut aturan-aturannya.Selain itu aparat juga selalu menginfokan apabila ada kegiatan-kegiatan seperti pembangunan jalan di susun, masyarakat diberikan kepercayaan untuk pengerjaan jalan tersebut, pemerintah hanya menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Jika ada program seperti program raskin, aparat juga langsung menginfokan kepada masyarakat baik kepada kepala Dusun maupun langsung kepada masyarakat melalui pertemuan sehari-hari di mesjid, maupun di warung-warung. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Maleo yaitu,

“Kami selaku aparat pemerintahan desa sudah berupaya melakukan sosialisasi tentang perencanaan pembangunan, memang mungkin belum maksimal apalagi saya masih baru menjabat sebagai kepala Desa tahun ini, jadi masih banyak yang harusdibenahi, dan kami selau berusaha untuk melakukan yang

terbaik untuk desa ini, semisal ada bantuan ataupun kegiatan, kami selalu upayakan menginfokan kepada masyarakat” (Wawancara Desember 2020).

Dengan adanya sosialisasi perencanaan pembangunan partisipatif kepada masyarakat di desa Maleo, masyarakat akan lebih paham makna dari perencanaan pembangunan itu sendiri.

4.2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Maleo

Peranan perencanaan Partisipatif penting sekali dilakukan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat dalam pembangunan khususnya di Desa Maleo. Dengan adanya Partisipasi, masyarakat dapat menyuarakan dan mengidentifikasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desanya, segala potensi desa dapat dioptimalkan penggunaannya, namun bukan hanya sebagai daftar keinginan masyarakat semata melainkan harus disusun dengan menggunakan kriteria terukur, karena tidak semua keinginan dapat terwujud karena keterbatasan dana dan sumber daya.

Oleh karena itu harus ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam ha perencanaan pembangunan. Pemerintah desa dan perangkatnya harus aktif dalam melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan khususnya di Desa Maleo.

Namun masih ada masyarakat yang masih ragu ragu bahkan tidak mengetahui apakah musrenbang telah dilaksanakan di desa Maleo. Hal ini didukung oleh pernyataan seorang warga yaitu:

“Saya tidak yakin apakah musrenbang-des sudah dilakukan di desa Maleo atau belum karena saya tidak pernah mendengar info tentang hal itu. Saya

memang jarang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi saya juga tidak pernah diundang”, (Wawancara Desember 2020)

Namun menurut keterangan dari sekretaris Desa Maleo, musyawarah Perencanaan pembangunan desa telah selesai dilakukan, seperti pernyataan dibawah ini:

“Di desa Maleo telah dilakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada bulan Juli yang lalu. Forum musyawarah yang dihadiri oleh BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, kepala Dusun dan perwakilan dari masyarakat. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.(Wawancara Desember 2020).

Penyelenggaraan Musrenbang-des sangat penting sekali dalam pembangunan, karena dengan Musrenbang-des bisa terwujud perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, terpelihara dan berkembangnya hasil-hasil pembangunan di desa akan menumbuhkembangkan serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Proses-proses dalam merumuskan program-program dalam musrenbangdes dilakukan sesuai dengan alur. Adanya peran dari kecamatan juga turut membantu gerak pembangunan desa. Berikut ini alur koordinasi perencanaan pembangunan antara tingkat kecamatan dengan desa akan dijabarkan oleh Sekretaris Camat Paguat yaitu:

Ketika musrenbang-des dilakukan, tim dari kecamatan berkoordinasi dengan desa dalam memfasilitasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Tempat dan sarana yang dibutuhkan kami sediakan dengan baik. Tidak hanya itu, kami juga turut membantu mendiskusikan apa-apa saja yang dibutuhkan di desa, segala usulan ditampung, kemudian ditetapkan mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan di desa, kemudian hasil musyawarah tersebut dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan dihadiri oleh perwakilan dari desa (kepala Desa dan tokoh masyarakat dan juga utusan dari kabupaten. Dalam musrenbang kecamatan tersebut akan diputuskan mana yang menjadi skala prioritas pembangunan di desa-desa, lalu hasilnya dibawa ke tingkat kabupaten” (Wawancara Desember 2020).

Pada bagian ini kita akan melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Maleo. Di bawah ini disajikan tabel jawaban responden mengenai keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Maleo.

Berikut pernyataan kepala Desa Maleo terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Maleo, yaitu :

“Di Desa Maleo, masyarakat tidak semua ikut serta dalam musrenbangdes, karena tidak semua masyarakat kami undang hanya perwakilan saja dari setiap dusun, karena kalau semua masyarakat diundang akan sangat sulit dan merepotkan. Perwakilan dari setiap dusun inilah yang akan memberikan informasi seputar kondisi di dusun mereka masing-masing” (Wawancara Desember 2020).

Tingkat keberhasilan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diadakan sangatlah mendukung terwujudnya partisipasi masyarakat yang ideal, tetapi dalam hal ini masyarakat juga haruslah aktif menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka akan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat masih cukup rendah dalam tahap perencanaan karena hanya sedikit masyarakat yang ikut dalam musrenbang. Namun masyarakat yang diundang sudah cukup aktif dalam memberikan masukan masukan dalam melaksanakan pembangunan di Desa.

Selain itu partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan maupun dalam pemanfaatan masih kurang karena masyarakat kurang memperhatikan ataupun merawat hasil-hasil pembangunan yang telah diimplementasikan. Seperti perawatan jalan dan perawatan fasilitas lainnya. Seperti pernyataan dari sekretaris Camat di bawah ini :

“Masyarakat memang cukup aktif jika di ajak mengikuti musrenbang, banyak usulan yang disampaikan tapi dalam perawatan hasil pembangunan kesadaran masyarakat masih cukup rendah, seperti jika ada jalan yang baru di perbaiki rusak sedikit, masyarakat tidak akan mau menutup lobang itu agar tidak semakin besar. (Wawancara Desember 2020).

Hal ini juga senada dengan penuturan sekretaris desa, Desa Maleo yang ketika penulis temui di kantor desa, beliau hendak melaksanakan kegiatan gotong royong dengan beberapa aparat desa lainnya. Ketika penulis bertanya mengapa hanya aparat yang bergotong royong, dan masyarakat tidak dilibatkan, berikut jawaban beliau:

Memang kami yang selalu melaksanakan gotong royong, kami tidak pernah mengajak ataupun melibatkan masyarakat setempat untuk bergotong royong karena ujung-ujungnya pasti duit. (Wawancara Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat akan mau diajak bergotong royong jika diberi upah atau bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat tinggi hanya dalam memberikan ide-ide atau gagasan dalam musyawarah, namun partisipasi masyarakat dalam bentuk lain seperti gotong royong dan sebagainya masih rendah. Terbukti dengan banyaknya usulan-usulan yang diberikan masyarakat, namun hal ini seharusnya harus berdampak juga terhadap partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan hasil pembangunan.

4.2.4. Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan Kebutuhan Masyarakat

Di dalam pelaksanaan pembangunan, kesesuaian antara permintaan atau harapan masyarakat dengan program pembangunan yang dilaksanakan merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan. Pada bagian ini kita akan melihat apakah ada kesesuaian antara program-program pembangunan di desa

dengan aspirasi masyarakat dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Apakah hasil-hasil kesepakatan di dalam musrenbang-des menjadi acuan dalam implementasi program-program pembangunan desa, dan bagaimana sebenarnya implementasi dari proses perencanaan pembangunan di Desa Maleo.

Adanya Transparansi program-program pembangunan dapat membangun kepercayaan (*Trust*) antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam melakukan pembangunan di suatu daerah. Dengan begitu kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dapat terukur. Masyarakat di Desa Maleo mengaku sedikit banyak mereka tau tentang program pembangunan. Hal ini seperti disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Desa Maleo, yaitu

“Sedikit banyak saya mengetahui tentang program pembangunan di Desa Maleo ini misalnya program pembangunan seperti PNPM, Program Raskin, Pembangunan Jalan, dan lain-lain, karena saya sering berbincang-bincang dengan aparat pemerintah desa” (Wawancara desember 2020)

Berdasarkan hal ini maka masyarakat di Desa Maleo menyatakan bahwa implementasi pembangunan sudah mulai berjalan baik.

Namun demikian pembangunan di Desa Maleo belumlah dikatakan maksimal baik pembangunan fisik maupun non fisik, karena masih banyak dusun yang membutuhkan pembangunan seperti pembangunan jalan yang masih banyak membutuhkan perbaikan. penyediaan sarana air bersih, yang masih membutuhkan perbaikan, pembangunan irigasi, dan lain-lain. Selain itu di desa ini juga masih membutuhkan pembangunan non Fisik, karena masih banyak keluarga pra sejahtera. Selain itu BPD sebagai badan Permusyawaratan Desa tempat menampung berbagai aspirasi masyarakat, kurang aktif dalam memperhatikan

kebutuhan dan permasalahan desa. Terkait dengan hal ini, anggota BPD Desa

Maleo menyatakan bahwa :

“Memang benar masih banyak yang perlu dibenahi di desa Maleo ini, masih banyak yang memerlukan pembangunan seperti misalnya pembangunan jalan di dusun-dusun. Selain itu masih banyak keluarga yang tergolong pra sejahtera, dan kami sadari bahwa kami selaku BPD memang kurang aktif dalam mengupayakan aspirasi masyarakat terkait pembangunan dikarenakan banyak faktor, walaupun demikian masyarakat kondisi ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk tetap berpartisipasi menyuarakan aspirasinya, mereka masih semangat dalam mengikuti musyawarah walaupun usulan mereka sering tidak gol, mereka tidak putus semangat dan tetap bersabar. Karena itu kami selaku BPD tidak ingin kalah semangat, sehingga saat ini sedang berupaya berbenah diri untuk lebih baik lagi kedepannya. (Wawancara desember 2020)

Dengan adanya proses pembangunan yang kini berlangsung di Desa Maleo, dan pembangunan tersebut bisa terlaksana dengan baik didasarkan pada usulan masyarakat membuat masyarakat merasa puas, dan mereka menganggap bahwa pembangunan yang sedang berlangsung saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 1999 mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus

diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain.

Sekarang ini daerah harus melakukan sendiri aktivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin banyak tersebut, maka sumber daya manusia harus siap, baik jumlah maupun kualitasnya. Sedangkan dalam hal sumber pembiayaan pembangunan, daerah dituntut untuk mampu membiayai sebagian besar kegiatan pembangunannya, sehingga sekali lagi diperlukan sumber daya manusia kreatif yang dapat menghasilkan pemikiran, konsep, dan kebijakan bagi pemenuhan sumber pembiayaan pembangunan. Dengan lahirnya otonomi daerah serta era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, maka dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (*grass roots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan manusia. Pembangunan yang dilakukan harus proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering

dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program- program pembangunan dirancang serta sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program- program pembangunan yang tidak melibtkan masyarakat. Proses pembanguan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus ditentukan berdasarkan dimensi pembangunan, yakni tergantung pada focus dan orientasi pembanguan mana yang di laksanakan dan dimensi mana yang menjadi lebih perhatian bersama baik *decision maker* dan *planner* sebagai perencana dan perancang, para pelaksan pembangunan itu sendiri sebagai pihak yang menjalankan atau sering disebut sebagai agen pembangunan, maupun para masyarakat pada umumnya sebagai sasaran pembangunan. (Safi'i 2007:81).

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian wewenang ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat (*Communitydevelopment*) sangat bergantung kepada peran pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi, tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk- produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang diakhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Penelitian ini mengkaji tentang proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa. Penelitian dilakukan di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penilaian terhadap lima aspek yang merupakan sorotan bagi proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi: adanya pedoman yang mengatur tentang perencanaan pembangunan partisipatif, pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif, partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa, hambatan- hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, serta kesesuaian

implementasi pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat setempat, kelima aspek tersebut akan memang belum berjalan dengan baik sehingga perlu di tingkatkan lagi.

Menurut masyarakat Desa Maleo perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan mereka dalam merumuskan program-program desa, dimana adanya sinergi dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari perwujudan kemakmuran desa

BAB V **P E N U T U P**

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data melalui berbagai dokumen yang mendukung serta wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan beberapa informan maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai proses perencanaan partisipatif dan implementasinya dalam pembangunan di Desa Maleo, kecamatan Paguat adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perencanaan Partisipatif di Desa Maleo dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pedoman di desa tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, dengan adanya pedoman tersebut berkat sosialisasi dari pemerintah desa maka masyarakat dapat memahami akan pentingnya perencanaan partisipatif, masyarakat juga sudah mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, sudah mulai ada kesesuaian rencana kerja pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat, serta realisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui musrenbang-des. Musrenbang-des sudah menjadi wadah bagi masyarakat dalam memberikan saran untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Maleo. Meskipun memang diakui bahwa masih kurangnya pemerataan dalam pembangunan, disamping pembangunan berjalan dengan baik, namun di sisi lain masih belum, namun begitu semangat mereka untuk berpartisipasi menyuarakan

aspirasinya tidak pudar, mereka turut serta dalam musyawarah-musyawarah desa walaupun program-program yang mereka usulkan seringkali tidak terealisasi.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif dalam proses perencanaan partisipatif adalah sebagian besar usulan-usulan mereka tidak terealisasi dalam bentuk program khususnya pembangunan fisik misalnya perbaikan jalan di salah satu dusun di desa Maleo, penerangan jalan di dusun perluasan dan lain-lain. Masyarakat desa Maleo cukup bersabar, jika program pembangunan yang mereka usulkan tak kunjung terimplementasi dari pemerintah maka mereka akan menunggu dan mengusulkan lagi tahun berikutnya. Hal ini mungkin karena dipengaruhi oleh masyarakat yang mayoritas adalah apatis dalam pembangunan, yang cenderung lebih cuek dan hanya terfokus pada aktivitas mereka sehari-hari. Dan jika program mereka tidak terealisasi bisanya mereka hanya akan bersungut-sungut dan kemudian melupakannya.
3. Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Maleo ada pedoman perencanaan Partisipatif. Dengan adanya aturan-aturan ketika masyarakat melakukan musrenbang-des misalnya. Mereka diberitahu tentang alur-alur dalam proses perencanaan oleh pemerintah desa setempat.
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Maleo dalam tahap pelaksanaan maupun dalam pemanfaatan masih kurang karena masyarakat kurang memperhatikan ataupun merawat hasil-hasil

pembangunan yang telah diimplementasikan. Seperti perawatan jalan dan perawatan fasilitas lainnya.

5. Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan Kebutuhan Masyarakat Dengan adanya proses pembangunan yang kini berlangsung di Desa Maleo, dan pembangunan bisa terlaksana dengan baik didasarkan pada usulan masyarakat membuat masyarakat merasa puas, dan mereka menganggap bahwa pembangunan yang sedang berlangsung saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka.

5.2. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian tentang proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan di Desa Maleo, kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato maka ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh penulis sebagai sumbangsih pemikiran dari kajian ilmiah ini yaitu:

1. Pemerintah daerah setempat lebih meningkatkan kinerjanya lagi, adapun upaya- upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat telah dilakukan dan sudah mulai menampakkan hasilnya, meskipun belum maksimal karena masih ada ketidakmerataan dalam pembangunan.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat lebih aktif dalam kegiatan kegiatan desa. Tidak hanya aktif dalam memberikan usulan melainkan partisipasi lain juga harus ditingkatkan seperti merawat dan memelihara hasil pembangunan masih sangat kurang dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari segi kurang aktifnya mereka dalam

kegiatan- kegiatan desa, misalnya gotong royong dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.

3. Adanya potensi kultur psikologis masyarakat di Desa Maleo yang cenderung *cuek* terhadap kebijakan pemerintah kiranya ini jangan disalahgunakan sehingga mengabaikan kebutuhan mereka. Sebab apabila hal ini terjadi maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan pudar, mereka menjadi apatis, bahkan yang paling dikhawatirkan potensi terjadinya konflik sangat besar. Sikap inisiatif dan partisipatif yang terdapat pada masyarakat di Desa Maleo merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan, sehingga dengan demikian desa akan segera mengalami percepatan dalam pembangunan.
4. Pelibatan masyarakat juga harus lebih ditingkatkan lagi dalam setiap proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui apa yang menjadi masalah di desa dan apa yang mereka butuhkan, jadi pelibatan masyarakat dari seluruh elemen harus lebih diutamakan.
5. Musrenbang-des merupakan suatu forum bagi masyarakat desa dalam merencanakan apa yang menjadi kebutuhannya dalam pembangunan desa, jadi pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap hasil Musrenbang-des karena didalamnya tertampung seluruh aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah juga harus lebih peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat, serta tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander.2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan
- Adisasmita, Raharjo.2004. *Pembangunan Pedesaan dan Perkoataan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bintoro, TjokroAmidjojo. 1985, *Perencanaan Pembangunan*, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta.
- Chozin, dkk.2010. *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press
- Conyers, Diana.1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Purnamasari, Irma. 2008, *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi* , Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Huraerah Abu. 1962. *Dinamika Kelompok: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Ketaren Nurlela.2009. *Administrasi Pembangunan*. Medan: USU Press
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kunarjo.2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press
- Kusmiadi,H.R.1995. *Teori dan Teknik Perencanaan*.Bandung: Ilham Jaya
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembanguna Perumahan dan Pemukiman Jakarta*.

Jakarta: Yayasan Realestate Indonesia PT. Rakasindo

Michael, Todaro.1977. *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy.2001.*Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja
Rosada Karya.

Moelyarto, Tjokrowinoto.1999. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. Yogyakarta:
Kreasi Wacana.

Nasution, Arifin.2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*.Medan : FISIP USU
Press

Ndaraha, Taliziduhu. 1982. *Demensi-Demensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi
Aksara.

Nugroho Riant dan Randy R. 2003. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*.
Jakarta: Gramedia

Pamudju Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta
Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni

Riyadi dan Dedi Supryadi Bratakakusumah. *Perencanaan Pembangunan
Daerah: Strategi menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi
Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Sastroputro. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam
Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Safi'i, M. 2007. *Strategi dan Kebijakan Ekonomi Pembangunan Daerah
Perspektif Teoritik*. Malang:Averoes Press

Siagian,Sondang.P.1994. *Admnistrasi Pembagunan*. Jakarta: Gunung Agung

Singarimbun, Masri dan Sopian Efendi. 1999. *Metode Penelitian Survei*.
Jakarta: LP3ES

Slamet.1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*. Surakarta:

Sebelas Maret University Press.

Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&B*.

Bandung: Alfabeta

Suyanto, Bagong.2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.

Jakarta: Prenada

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Mas

Agung

Wahab, Solichin, A.1990. *Analisa Kebijaksanaan dan Formulasi ke*

Implementasi Kebijaaksanaan Negara. Malang: Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra,dkk.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*: Jakarta: Raja Grafindo

Zuriah, Nurul.2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi

Aksara

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/sj tertanggal 20 Januari 2005 diatur petunjuk teknis Musrenbang.

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

**Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah**

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas informan :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Indikator Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Desa Maleo Kecamatan Paguat sebagai berikut :

1. Perumusan perencanaan pembangunan di desa maleo kecamatan paguat

- a. Bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan di desa maleo kecamatan paguat. ?
- b. Bagaimana proses pengolahan data terkait dengan perencanaan pembangunan di desa maleo kecamatan paguat?
- c. Apakah perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu ?

2. Pelaksanaan pembangunan di desa maleo kecamatan paguat

- a. bagaimana proses koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kecamatan paguat dalam implementasi perencanaan pembangunan?.
- b. bagaimana proses konsultasi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kecamatan paguat dalam implementasi perencanaan pembangunan?.
- c. bagaimana proses pengendalian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kecamatan paguat dalam implementasi perencanaan pembangunan?.

3. Menilai pelaksanaan pembangunan di desa maleo kecamatan paguat

- a. bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh pemerintah desa kecamatan paguat dalam implementasi perencanaan pembangunan?..
- b. bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kecamatan paguat dalam implementasi perencanaan pembangunan?.

- c. bagaimana proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah desa kecamatan paguat dalam implementasi perencanaan pembangunan?.

4. Pelaksanaan tugas lain di desa maleo kecamatan paguat

- a. bagaimana pengamatan lapangan yang dilakukan oleh pemerintah desa kecamatan paguat pada saat pelaksanaan pembangunan?
- b. apa yang dilakukan oleh pemerintah desa setelah melakukan pengamatan lapangan
- c. apa kendala pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa maleo?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Nama : Sri Foni Djafar

Jabatan: Kepala Seksi Pelayanan Pembangunan



Nama : Nining Polutu

Jabatan: Sekretaris Desa Maleo



Nama : Marce Hagugu

Jabatan: Kepala Seksi Pemerintahan



Nama : Sri Wahyuni Oli'i

Jabatan: Kaur Keuangan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 824466, 830975 Fax (0435) 829976,
Email : lembaga penelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2856/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Maleo Kabupaten Pohuwato

Di-

Marisa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.SE.MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dandriyanto Ahmad

NIM : S2117162

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Maleo Kabupaten Pohuwato

Judul Penelitian : PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA MALEO KECAMATAN
PAGUAT KABUPATEN POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2020

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian

Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Rahmisyari, ST. SE. MM

NIDN 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN PAGUAT
DESA MALEO**

Jl. Trans Sulawesi Paguat No.Telp (0443)210..

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 474 /DSM-PGT/ 134 / III / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **RAM BOTUTIHE**
Jabatan : Kepala Desa Maleo
Alamat : Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Menerangkan dengan sesungguhnya Kepada:

Nama : **DANDRIYANTO AHMAD**
Nim : S2117162
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 25 – 07 – 1998
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Alamat : Desa Maleo Kec Paguat Kab Pohuwato

Bahwa yang bersangkutan tersebut Diatas Benar-benar Melakukan Penelitian di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Dengan Judul PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Maleo, 30 Maret 2021

Kepala Desa Maleo





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0812/UNISAN-G/S-BPMI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : DANDRIYANTO AHMAD
NIM : S2117162
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Di desa maleo kecamatan paguat kabupaten pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI DANDRIYANTO AHMAD S2117162, 2021, "Perencanaan P...

29%

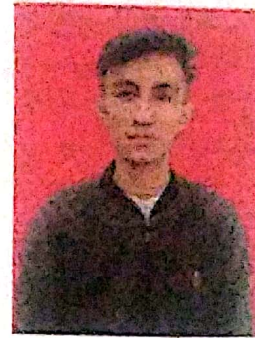
OVERALL SIMILARITY

Rank	Domain	Category	Percentage
1	id.123dok.com	INTERNET	19%
2	www.scribd.com	INTERNET	1%
3	text-hd.123dok.com	INTERNET	1%
4	123dok.com	INTERNET	<1%
5	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
6	edoc.pub	INTERNET	<1%
7	repository.utu.ac.id	INTERNET	<1%
8	duniakampusblog.files.wordpress.com	INTERNET	<1%
9	core.ac.uk	INTERNET	<1%
10	id.scribd.com	INTERNET	<1%
11	qdoc.tips	INTERNET	<1%
12	fenniprtw.blogspot.com	INTERNET	<1%
13	eprints.uny.ac.id	INTERNET	<1%
14	ctppa.ciptakarya.pu.go.id	INTERNET	<1%
15	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
16	universitassanibakampusarolangun.blogspot.com	INTERNET	<1%

- **Hone**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dandriyanto Ahmad
2. Nim : S21.171.62
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Sospol
5. Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 25-juli-1998
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat
 - a) Desa : Maleo
 - b) Kecamatan : Paguat
 - c) Kabupaten : Pohuwato
 - d) Provinsi : Gorontalo
10. No. HP : 0823-4444-1609



- I. Data Keluarga
 - Ayah : Udin Ahmad
 - Ibu : Rabiyyanti Ahmad Bagoe
- II. Pendidikan
 - SDN 1 inpres Maleo : Tahun Lulus 2011
 - SMP Negeri 2 Paguat : Tahun Lulus 2014
 - SMA Negeri 1 Marisa : Tahun Lulus 2017
 - Perguruan Tinggi S1 : Universitas Ichsan Gorontalo

Pohuwato, 30 Maret 2021

Dandriyanto Ahmad

Nim. S21.171.62